

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritik

1. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh suatu negara untuk membiayai kegiatan-kegiatannya dalam rangka menjalankan fungsimewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pengeluaran pemerintah terdiri atas:

a. Pengeluaran rutin

Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang (Hutang Dalam Negeri, Hutang Luar Negeri), subsidi (Subsidi BBM, Subsidi Non BBM) dan pengeluaran rutin lainnya.

b. Pengeluaran pembangunan

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun nonfisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu.

Suparmoko (1994) mengklasifikasikan pengeluaran pemerintah menjadi:

- a. Pengeluaran pemerintah merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang.
- b. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
- c. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
- d. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Menurut Musgrave dan Rostow dalam Marselina (2006: 41) perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat dua sifat pengeluaran pemerintah, yaitu :

a. Bersifat eksklusif

Pengeluaran pemerintah yang ada kontra prestasinya berupa pembelian atau belanja barang atau jasa dalam perekonomian baik untuk konsumsi maupun untuk menghasilkan barang lagi atau produksi.

b. Bersifat transfer

Pengeluaran pemerintah yang tidak ada kontra prestasinya (penyimpangan atau pemindahan). Termasuk dalam pengeluaran ini adalah subsidi yang merupakan alat retribusi pendapatan.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi suatu fenomena/masalah yang terjadi di masyarakat. Anderson dalam Tangkilisan (2003: 2) berpendapat bahwa Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

- a. kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan;
- b. kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah;
- c. kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan;

- d. kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
- e. kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atas sebuah justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan (Edi, 2008).

3. Definisi Manajemen

Manajemen adalah Sebuah proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara bekerjasama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya.

Menurut Handoko (2003), fungsi manajemen terbagi menjadi 5, yaitu:

- a. Perencanaan (*Planning*)

Rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.

- b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dilakukan untuk membagi kegiatan yang besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah

manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi.

c. Penyusunan Personalia (*Staffing*)

Penyusunan personalia adalah perekrutan, latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi pada para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif.

d. Pengarahan (*Leading*)

Pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok dapat berusaha untuk mencapai sasaran sesuai perencanaan manajerial dan usaha.

e. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dilakukan agar rencana yang telah diambil dapat berjalan efektif sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pembinaan manajemen adalah Pembinaan dan pelatihan SDM agar mampu berfungsi memenuhi tuntutan pasar kerja. Pembinaan dilakukan dalam bentuk, pelatihan manajemen usaha, supervisi lapangan serta pemberian pinjaman berupa modal kerja dan investasi.

4. Efektivitas

Pengertian Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektivitas merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu program. Suatu program dapat dikatakan efektif jika program tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian program merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

5. PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pembangunan yang dikelola Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri.

a. Tujuan PNPM Mandiri

1) Tujuan Umum

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus PNPM Mandiri Perdesaan meliputi:

- Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
- Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD).
- Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

b. Strategi PNPM Mandiri

1) Strategi Dasar

Adapun yang menjadi strategi dasar dari PNPM Mandiri yaitu: mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dan

menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif.

2) Strategi Operasional

Yang menjadi strategi dalam operasional program PNPM Mandiri adalah mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah secara sinergis sebagai pengelola program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Hal-hal yang dilakukan meliputi: pengembangan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel serta mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas masyarakat.

c. Kelembagaan pada PNPM Mandiri

Kelembagaan PNPM Mandiri pada hakekatnya bertujuan untuk penguatan terhadap hak kepemilikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk melaksanakan aktivitas, khususnya dalam meningkatkan kapasitas dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.

Secara umum, struktur organisasi PNPM Mandiri adalah sebagai berikut:

1) Pusat

Dalam rangka koordinasi dan pengendalian PNPM Mandiri, dibentuk tim pengendali PNPM Mandiri. Tim pengendali PNPM Mandiri terdiri atas:

- Tim Pengarah

Tim pengarah terdiri atas menteri-menteri dan kepala lembaga terkait pelaksanaan PNPM Mandiri.

- Tim pelaksana

Tim pelaksana terdiri atas pejabat eselon I ke bawah dari berbagai Kementerian/lembaga terkait pelaksanaan PNPM Mandiri.

2) Daerah

Struktur organisasi PNPM Mandiri di daerah meliputi:

- Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi

Di daerah dibentuk tim koordinasi PNPM Mandiri yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah dibawah koordinasi TKPKD Provinsi.

- Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/kota

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi PNPM Mandiri, di daerah dibentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri kabupaten/kota yang anggotanya terdiri pejabat instansi terkait di daerah dibawah koordinsi TKPKD kabupaten/kota.

- Satuan kerja PNPM Mandiri di Kabupaten/Kota

Pelaksanaan PNPM Mandiri di kabupaten/kota dilakukan oleh satuan kerja kabupaten/kota. Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota yang memberikan pelayanan kepada desa/kelurahan dan bertugas memfasilitasi desa/kelurahan dalam rangka kerja sama desa/kelurahan bagi kepentingan program.

- Masyarakat/Komunitas

Masyarakat membentuk atau mengembangkan kelembagaan masyarakat yang salah satu fungsinya adalah mengelola kegiatan di kecamatan dan desa/kelurahan. Kelembagaan di kecamatan adalah Badan Kerja Antar Desa (BKAD) dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola yang bertanggungjawab kepada MAD.

Kelembagaan PNPM Mandiri di desa/kelurahan adalah lembaga keswadayaan masyarakat yang dibentuk, ditentukan oleh masyarakat, dan bertanggungjawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan. Lembaga ini berfungsi secara kolektif dan bertanggungjawab terhadap pengelola kegiatan PNPM Mandiri di desa/kelurahan.

d. Pendanaan Pada PNPM Mandiri Perdesaan

Sumber dana PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- 3) Swadaya masyarakat
- 4) Partisipasi dunia usaha

Mekanisme pencairan dana BLM dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke rekening kolektif bantuan PNPM (BPNPM) yang dikelola oleh UPK diatur sebagai berikut:

- 1) Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Depkeu
- 2) Pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku di daerah
- 3) Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatur dalam peraturan Dirjen PMD, Depdagri
- 4) Penerbitan SPP harus dilampiri dengan berita acara hasil pemeriksaan terhadap kesiapan lapangan yang dilakukan fasilitator kecamatan
- 5) Dana yang berasal dari APBD harus dicairkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan pencairan dana yang berasal dari APBN
- 6) Besaran dana BLM dari APBD yang dicairkan ke masyarakat harus utuh tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya.

Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari rekening kolektif BLM yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa. Mekanisme penyaluran dana sebagai berikut:

- 1) Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPK
- 2) TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB, dan lampirannya

- 3) Untuk penyaluran berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah

Kebutuhan biaya operasional kegiatan TPK/desa dan UPK bertumpu pada swadaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut mdiberikan bantuan stimulan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan. Dana operasional UPK sebesar maksimal dua persen (2%) dari dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan di Kecamatan tersebut. Dana operasional TPK/ desa maksimal tiga persen (3%) dari dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan sesuai hasil Musyawarah Antar Desa Penetapan Kegiatan menurut Surat Penetapan Camat (SPC) untuk desa yang bersangkutan.

6. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Berbicara mengenai Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang termasuk dalam PNPM Mandiri membuat kita teringat dengan Muhammad Yunus, pria kelahiran Bangladesh peraih nobel perdamaian pada tahun 2006. Tahun 1974, Bangladesh mengalami bencana kelaparan. Yunus terjun langsung dalam melawan kelaparan, yunus menjalankan sistem bagi hasil yang disebutnya Pertanian Tiga Pihak di desa Jobra. Yunus berandil pada biaya bahan bakar pompa artesis, bibit tanaman unggul, pupuk, insektisida, dan pengetahuan teknis. Pihak kedua buruh tani menyumbangkan tenaganya dan pihak ketiga pemilik lahan. Walaupun sangat sulit meyakinkan semua pihak, dan Yunus

sendiri merugi 13.000 taka, program ini berhasil. Untuk pertama kalinya, padi-padi berdiri tegak bagaikan permadani hijau di musim kemarau.

Pertanyaan yang selalu membuat Yunus gundah adalah mengapa orang yang bekerja 12 jam sehari, 7 hari seminggu tidak punya cukup makanan untuk makan. Kegundahan Yunus semakin menjadi-jadi ketika masalah kemiskinan cukup mudah untuk dimengerti namun tidak mudah untuk menemukan solusinya. Muhammad Yunus menemukan pencerahan ketika pada salah satu acara berkeliling ke desa bertemu dengan seorang wanita pembuat bangku dari bambu. Namun, karena ketidadaan modal wanita tersebut meminjam kepada rentenir untuk membeli bambu sebagai bahan baku. Setelah bangku tersebut jadi harus dijual kepada rentenir dan dia hanya mendapatkan selisih keuntungan sekitar 1 penny.

Pria kelahiran Chittagong, Bangladesh pada 28 juni 1940 ini akhirnya mendirikan Grameen Bank sebagai sebuah alternatif pemberdayaan kelompok miskin di Bangladesh pada tahun 1976. Tidak kepada sembarang orang Yunus dan Grameen Bank menyalurkan kreditnya. Sebagai bagian dari usaha pemberdayaan, Yunus memberikan kredit kepada wanita dalam nilai yang kecil dan tidak menggunakan jaminan. Salah satu target utama dari kredit yang diberikan Grameen adalah mereka yang tak memiliki tanah. Karena kelompok masyarakat dalam kategori tersebut sama sekali tidak memiliki akses untuk mendapatkan kredit. Dengan nilai kredit yang tidak terlalu besar, perempuan pedesaan Bangladesh yang secara tradisional tidak terlalu banyak berkontribusi ekonomi dapat mencoba menumbuhkan usaha-usaha kecil yang

menghasilkan uang. Dukungan moral dari sesama anggota kelompok peminjam menjadi pemacu pengembalian kredit secara disiplin.

Konsep perubahan yang diterapkan oleh yunus inilah yang ingin diterapkan pula oleh pemerintah Indonesia melalui PNPM Mandiri dimana salah satu programnya adalah pemberdayaan perempuan. Dalam Konferensi Tingkat Menteri Bidang Pemberdayaan Perempuan, Organisasi Konferensi Islam (OKI) ke-4 yang dilaksanakan di Jakarta.

Dalam kesempatan ini Indonesia mengangkat isu pembangunan ekonomi mengingat sebagian besar negara anggota OKI merupakan negara berkembang dan memiliki tantangan yang hampir serupa terkait peran dan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, khususnya kesempatan ekonomi bagi perempuan baik dalam memperoleh pekerjaan, akses finansial dan sumber daya produktif, maupun dalam konteks migrasi. Selain itu, peningkatan kemampuan ekonomi perempuan telah terbukti berdampak positif bagi kesejahteraan keluarganya dan komunitasnya.

7. Definisi Usaha Kecil

Dalam Undang-undang No. 9 pasal 1 ayat (1) tahun 1995 dikatakan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Usaha kecil adalah para pelaku usaha ekonomi yang sering dikategorikan sebagai perusahaan yang berskala kecil, menggunakan teknologi tradisional dan dikelola secara sederhana (Dekopin, 2002). Usaha-usaha kecil dan mikro terdapat pada seluruh sektor perekonomian, yaitu:

- a. Pada sektor pertanian, tercatat tidak kurang dari 20 juta keluarga yang hidup dari usaha pertanian yang termasuk kategori usaha kecil karena sebagian besar dari mereka mengusahakan lahan pertanian yang luasnya kurang dari 1 hektar.
- b. Pada sub sektor perkebunan, usaha kecil dan mikro berwujud pada kebun-kebun rakyat yang terbagi dalam lahan sempit.
- c. Pada sektor industri, usaha kecil dan mikro berwujud berbagai industri kecil rumah tangga yang menghasilkan berbagai jenis barangkerajinan dan keperluan rumah tangga.
- d. Pada sektor dagang, usaha kecil berwujud usaha perdagangan yang dijalankan rakyat kecil di pasar-pasar tradisional, toko, kios dan warung-warung di sepanjang jalan dan kampung-kampung.
- e. Pada sektor kehutanan, usaha-usaha kecil berwujud pada rupa-rupa usaha pemanfaatan hasil hutan.

Usaha kecil atau usaha skala rumah tangga merupakan sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang berdiri sendiri dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan

bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat”.

Usaha kecil atau usaha skala rumah tangga memiliki kelebihan dan kelemahan. Usaha kecil pada kenyataannya mampu bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang diakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi maupun *proteksi*, usaha kecil mampu menambah nilai devisa negara khususnya industri kecil di sektor informal dan mampu berperan sebagai penyangga dalam perekonomian masyarakat kecil/lapisan bawah. (M. Tohar : 27-29)

Di samping itu, usaha kecil juga memiliki nilai strategis bagi perkembangan perekonomian negara kita, antara lain sebagai berikut:

- a. Banyaknya produk-produk tertentu yang dikerjakan oleh perusahaan kecil. Perusahaan besar dan menengah banyak ketergantungan kepada perusahaan kecil, karena jika hanya dikerjakan perusahaan besar dan menengah, marginnya menjadi tidak ekonomis.
- b. Merupakan pemerataan konsentrasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi dalam masyarakat.
- c. Pajak relatif ringan, karena yang dikenakan pajak adalah pribadi/pengusaha, bukan perusahaannya.
- d. Memberikan peluang dan kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah demi berkembangnya usaha kecil.

- e. Relatif tidak membutuhkan investasi terlalu besar, tenaga kerja tidak berpendidikan tinggi, dan sarana produksi lainnya relatif tidak terlalu mahal.

Sedangkan dari sisi kelemahan yang dimiliki oleh usaha kecil atau skala rumah tangga, kelemahan dan hambatan dalam pengelolaan usaha kecil tersebut umumnya berkaitan dengan faktor *intern* dari usaha kecil itu sendiri. Kelemahan dan hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian kerja yang tidak proporsional, dan karyawan sering bekerja di luar batas jam kerja standar.
- b. Sering terjadi *mist*-manajemen dan ketidakpedulian pengelolaan terhadap prinsip-prinsip *manajerial*.
- c. Sering terjadi kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada intuisi dan ambisi pengelola, serta lemah dalam promosi.
- d. Tidak pernah melakukan studi kelayakan, penelitian pasar, dan analisis perputaran uang tunai.
- e. Sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik.

Berdasarkan kelebihan dan kelemahan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kelemahan dari usaha kecil selain dipengaruhi oleh faktor keterbatasan modal juga terlihat pada kelemahan dan manajerialnya.

B. Tinjauan Empirik

Sebelum melakukan penelitian, penulis mencoba mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Beberapa tinjauan empiris yang penulis ambil diantaranya:

Tabel 2. Tinjauan Empirik

Penulis	Judul	Model Yg Digunakan	Tujuan	Kesimpulan
Saparudin M & Basri Bado (2011)	Pengaruh Kemitraan Usaha Terhadap Kinerja Usaha Pad UKM dan Koperasi di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan	1. Uji hipotesis 2. Analisis Deskriptif	Mengetahui pengaruh kemitraan usaha terhadap kinerja usaha finansial dan kinerja usaha non finansial pada usaha kecil menengah dan koperasi di Kabupaten Jeneponto.	1. Pelaksanaan kemitraan usaha antara usaha kecil menengah dan koperasi di Kabupaten Jeneponto secara umum belum terlaksana secara maksimal . 2. Secara simultan (bersama-sama) kemitraan usaha berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja usaha finansial dan kinerja usaha non finansial pada usaha kecil menengah dan koperasi di Kabupaten Jeneponto.
Ghazali Syamni & Muhammad Hatta (2011)	Pengaruh Faktor Modal dan Pembinaan Manajemen Terhadap Kinerja Koperasi di Kota Lhokseumawe	1. Analisis Regresi Berganda. 2. Uji Hipotesis	menguji pengaruh faktor modal dan pembinaan manajemen terhadap kinerja koperasi di Kota Lhokseumawe	1. Faktor modal dan pembinaan manajemen berpengaruh terhadap kinerja koperasi di Kota Lhokseumawe 2. modal tidak lagi menjadi kendala namun pembinaan manajemenlah yang sangat dibutuhkan oleh pengusaha kecil dan koperasi.

Putu Yudi Arnaya, Made Suyana Utama	Efektivitas Kegiatan Simpan Pinjam Khusus bagi Kaum Perempuan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Denpasar Timur	analisis efektivitas, analisis deskriptif, dan analisis factor.	mengetahui bagaimana tingkat efektivitas kegiatan simpan pinjam kaum perempuan rumah tangga miskin di kecamatan denpasar timur, kota denpasar.	Dari kesimpulan yang didapat mengatakan bahwa kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dikatakan sangat efektif dengan nilai sebesar (84,20 persen) dan dari ketiga variabel tersebut yang berkontribusi paling besar terhadap efektivitas kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah variabel Input.
Yusbar Yusuf, Rita Yani Iyan, Edwin Saputra	Implikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan terhadap Pendapatan Pedagang Kecil di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2007 – 2010	uji jenjang Mann-Whitney (U-Test) $U = \frac{n_1 \cdot n_2}{2}$ $= \frac{2a \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 (n_1 + n_2)}{12}}}{2}$	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan terhadap pendapatan pedagang kecil di kecamatan langgam kabupaten pelalawan propinsi riau selama periode 2007 – 2010.	Dari hasil penelitian diketahui bahwa yang menyebabkan tidak semua pedagang kecil bisa mendapat pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan adalah didominasi oleh faktor kondisi laba usaha atau sisa hasil usaha yang tidak jelas yaitu sebanyak 41,18%. Di susul oleh kondisi ekonomi anggota kelompok sebagian besar tidak miskin yaitu sebanyak 23,53%, dan tujuan penggunaan pinjaman oleh pemanfaat tidak untuk kegiatan produktif yaitu sebanyak 17,65%. Faktor lain yang menyebabkan kelompok pemohon tidak bisa mendapatkan pinjaman adalah faktor dana yang terbatas.

Mega Puspita Ningsih, Prih Hardinto	Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang	Deksriptif	Untuk mengetahui jenis-jenis bantuan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah kabupaten Malang dan bagaimana pula dampak yang ditimbulkan dengan adanya bantuan tersebut.	Program Penanggulangan Kemiskinan Yang Telah Terealisasi di Desa Pait antara lain :PNPM-Mandiri dan PNPM-Generasi, Dana BOS, BKP3, BLT, Simpan pinjam pada koperasi wanita, Bantuan raskin, Bantuan kompor gas, Bantuan biogas, Jamkesmas.
-------------------------------------	---	------------	--	--